



BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR 27/KEP/B4/2024

TENTANG

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Jabatan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional perlu menetapkan kelas jabatan;
  - b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional perlu menyesuaikan besaran kelas jabatan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 9);
4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Jabatan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 641) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Jabatan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut Kelas Jabatan BKKBN sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelas Jabatan BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

1. Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.
2. Jabatan Fungsional, meliputi Jabatan Fungsional Keahlian, dan Jabatan Fungsional Keterampilan.
3. Jabatan Pelaksana.

KETIGA : Kelas Jabatan BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA atas persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Jabatan yang kelas jabatannya tidak tertuang dalam Keputusan ini dapat diberikan kelas jabatan paling rendah

(kelas 1) sampai dengan disesuaikan jabatan atau kelas jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

1. Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 123/KEP/B4/2022 tentang Penetapan Kelas Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
2. Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 135/KEP/B4/2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
3. Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 58/KEP/B4/2023 tentang Perubahan Atas Kepka Nomor 135/KEP/B4/2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
4. Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 181/KEP/B4/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala BKKBN Nomor 135/KEP/B4/2022 Tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
5. Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 239.A/KEP/B4/2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan kepala BKKBN nomor 135/KEP/B4/2022 tentang Kelas jabatan di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
6. Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 8/KEP/B4/2024 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Kepala BKKBN Nomor 135/KEP/B4/2023 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan BKKBN;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Januari 2024

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 27/KEP/B4/2024  
TENTANG  
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

**KELAS JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN ADMINISTRATOR, DAN JABATAN PENGAWAS  
DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>TUNJANGAN KINERJA PERKELAS JABATAN</b>
1.	Kepala	17	Rp. 33.240.000,00
2.	Sekretaris Utama	16	Rp. 27.577.500,00
3.	Deputi Bidang Pengendalian Penduduk	16	Rp. 27.577.500,00
4.	Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	16	Rp. 27.577.500,00
5.	Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga	16	Rp. 27.577.500,00
6.	Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi	16	Rp. 27.577.500,00
7.	Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan	16	Rp. 27.577.500,00
8.	Inspektur Utama	16	Rp. 27.577.500,00
9.	Kepala Biro Perencanaan	15	Rp. 19.280.000,00
10.	Kepala Biro Sumber Daya Manusia	15	Rp. 19.280.000,00

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>TUNJANGAN KINERJA PERKELAS JABATAN</b>
11.	Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara	15	Rp. 19.280.000,00
12.	Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana	15	Rp. 19.280.000,00
13.	Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat	15	Rp. 19.280.000,00
14.	Direktur Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk	15	Rp. 19.280.000,00
15.	Direktur Perencanaan Pengendalian Penduduk	15	Rp. 19.280.000,00
16.	Direktur Kerja Sama Pendidikan Kependudukan	15	Rp. 19.280.000,00
17.	Direktur Analisis Dampak Kependudukan	15	Rp. 19.280.000,00
18.	Direktur Bina Akses Pelayanan Keluarga Berencana	15	Rp. 19.280.000,00
19.	Direktur Bina Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana	15	Rp. 19.280.000,00
20.	Direktur Bina Kesehatan Reproduksi	15	Rp. 19.280.000,00
21.	Direktur Bina Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Khusus	15	Rp. 19.280.000,00
22.	Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak	15	Rp. 19.280.000,00
23.	Direktur Bina Ketahanan Remaja	15	Rp. 19.280.000,00
24.	Direktur Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	15	Rp. 19.280.000,00
25.	Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	15	Rp. 19.280.000,00
26.	Direktur Teknologi Informasi dan Data	15	Rp. 19.280.000,00
27.	Direktur Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga	15	Rp. 19.280.000,00
28.	Direktur Komunikasi, Informasi, dan Edukasi	15	Rp. 19.280.000,00
29.	Direktur Pelaporan dan Statistik	15	Rp. 19.280.000,00

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>TUNJANGAN KINERJA PERKELAS JABATAN</b>
30.	Direktur Bina Penggerakan Lini Lapangan	15	Rp. 19.280.000,00
31.	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana	15	Rp. 19.280.000,00
32.	Kepala Pusat Pelatihan dan Kerja Sama Internasional Kependudukan dan Keluarga Berencana	15	Rp. 19.280.000,00
33.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan	15	Rp. 19.280.000,00
34.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	15	Rp. 19.280.000,00
35.	Inspektur Wilayah I	15	Rp. 19.280.000,00
36.	Inspektur Wilayah II	15	Rp. 19.280.000,00
37.	Inspektur Wilayah III	15	Rp. 19.280.000,00
38.	Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi	15	Rp. 19.280.000,00
39.	Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi	12	Rp. 9.896.000,00
40.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Rumah Tangga dan Protokol	12	Rp. 9.896.000,00
41.	Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama	11	Rp. 8.757.600,00
42.	Kepala Balai Diklat Kependudukan dan Keluarga Berencana	11	Rp. 8.757.600,00
43.	Kepala Subbagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	9	Rp. 5.079.200,00
44.	Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Protokol	9	Rp. 5.079.200,00
45.	Kepala Subbagian Tata Usaha Kepala	9	Rp. 5.079.200,00



NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PERKELAS JABATAN
46.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pengendalian Penduduk	9	Rp. 5.079.200,00
47.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	9	Rp. 5.079.200,00
48.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga	9	Rp. 5.079.200,00
49.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi	9	Rp. 5.079.200,00
50.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan	9	Rp. 5.079.200,00
51.	Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Diklat Kependudukan dan Keluarga Berencana	9	Rp. 5.079.200,00

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

  
HASTO WARDOYO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 27/KEP/B4/2024  
TENTANG  
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

**KELAS JABATAN FUNGSIONAL  
DI LINGKUNGAN BADAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>TUNJANGAN KINERJA PERKELAS JABATAN</b>
1.	Analisis Anggaran Ahli Madya	12	Rp. 9.896.000,00
2.	Analisis Anggaran Ahli Muda	10	Rp. 5.979.200,00
3.	Analisis Anggaran Ahli Pertama	8	Rp. 4.595.150,00
4.	Analisis Hukum Ahli Madya	11	Rp. 8.757.600,00
5.	Analisis Hukum Ahli Muda	9	Rp. 5.079.200,00
6.	Analisis Hukum Ahli Pertama	8	Rp. 4.595.150,00
7.	Analisis Kebijakan Ahli Utama	14	Rp. 17.064.000,00
8.	Analisis Kebijakan Ahli Madya	12	Rp. 9.896.000,00

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>TUNJANGAN KINERJA PERKELAS JABATAN</b>
9.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	Rp. 5.979.200,00
10.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	Rp. 4.595.150,00
11.	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Madya	12	Rp. 9.896.000,00
12.	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	10	Rp. 5.979.200,00
13.	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama	8	Rp. 4.595.150,00
14.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Utama	14	Rp. 17.064.000,00
15.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	12	Rp. 9.896.000,00
16.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10	Rp. 5.979.200,00
17.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	Rp. 4.595.150,00
18.	Arsiparis Ahli Utama	13	Rp. 10.936.000,00
19.	Arsiparis Ahli Madya	11	Rp. 8.757.600,00
20.	Arsiparis Ahli Muda	9	Rp. 5.079.200,00
21.	Arsiparis Ahli Pertama	8	Rp. 4.595.150,00
22.	Arsiparis Penyelia	8	Rp. 4.595.150,00
23.	Arsiparis Mahir/Pelaksana Lanjutan	7	Rp. 3.915.950,00
24.	Arsiparis Terampil/Pelaksana	6	Rp. 3.510.400,00
25.	Assessor SDM Aparatur Ahli Utama	14	Rp. 17.064.000,00
26.	Assessor SDM Aparatur Ahli Madya	12	Rp. 9.896.000,00
27.	Assessor SDM Aparatur Ahli Muda	10	Rp. 5.979.200,00

8

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>TUNJANGAN KINERJA PERKELAS JABATAN</b>
28.	Assessor SDM Aparatur Ahli Pertama	8	Rp. 4.595.150,00
29.	Auditor Ahli Utama	14	Rp. 17.064.000,00
30.	Auditor Ahli Madya	12	Rp. 9.896.000,00
31.	Auditor Ahli Muda	10	Rp. 5.979.200,00
32.	Auditor Ahli Pertama	8	Rp. 4.595.150,00
33.	Auditor Penyelia	9	Rp. 5.079.200,00
34.	Auditor Mahir/Pelaksana Lanjutan	7	Rp. 3.915.950,00
35.	Auditor Terampil/Pelaksana	6	Rp. 3.510.400,00
36.	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Utama	13	Rp. 10.936.000,00
37.	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Madya	11	Rp. 8.757.600,00
38.	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	9	Rp. 5.079.200,00
39.	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Pertama	8	Rp. 4.595.150,00
40.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	12	Rp. 9.896.000,00
41.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	10	Rp. 5.979.200,00
42.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	8	Rp. 4.595.150,00
43.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya	12	Rp. 9.896.000,00
44.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda	10	Rp. 5.979.200,00
45.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	8	Rp. 4.595.150,00
46.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Utama	14	Rp. 17.064.000,00

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>TUNJANGAN KINERJA PERKELAS JABATAN</b>
47.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya	12	Rp. 9.896.000,00
48.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	10	Rp. 5.979.200,00
49.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	8	Rp. 4.595.150,00
50.	Perencana Ahli Utama	14	Rp. 17.064.000,00
51.	Perencana Ahli Madya	12	Rp. 9.896.000,00
52.	Perencana Ahli Muda	10	Rp. 5.979.200,00
53.	Perencana Ahli Pertama	8	Rp. 4.595.150,00
54.	Penyuluh KB Ahli Utama	13	Rp. 10.936.000,00
55.	Penyuluh KB Ahli Madya	11	Rp. 8.757.600,00
56.	Penyuluh KB Ahli Muda	9	Rp. 5.079.200,00
57.	Penyuluh KB Ahli Pertama	8	Rp. 4.595.150,00
58.	Penyuluh KB Penyelia	8	Rp. 4.595.150,00
59.	Penyuluh KB Mahir/Pelaksana Lanjutan	7	Rp. 3.915.950,00
60.	Penyuluh KB Terampil/Pelaksana	6	Rp. 3.510.400,00
61.	Penyuluh KB Pemula	5	Rp. 3.134.250,00
62.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	11	Rp. 8.757.600,00
63.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9	Rp. 5.079.200,00
64.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8	Rp. 4.595.150,00
65.	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8	Rp. 4.595.150,00

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>TUNJANGAN KINERJA PERKELAS JABATAN</b>
66.	Pranata Hubungan Masyarakat Mahir/Pelaksana Lanjutan	7	Rp. 3.915.950,00
67.	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil/Pelaksana	6	Rp. 3.510.400,00
68.	Pranata Keuangan APBN Penyelia	9	Rp. 5.079.200,00
69.	Pranata Keuangan APBN Mahir/Pelaksana Lanjutan	8	Rp. 4.595.150,00
70.	Pranata Keuangan APBN Terampil/Pelaksana	7	Rp. 3.915.950,00
71.	Pranata Komputer Ahli Utama	13	Rp. 10.936.000,00
72.	Pranata Komputer Ahli Madya	11	Rp. 8.757.600,00
73.	Pranata Komputer Ahli Muda	9	Rp. 5.079.200,00
74.	Pranata Komputer Ahli Pertama	8	Rp. 4.595.150,00
75.	Pranata Komputer Penyelia	8	Rp. 4.595.150,00
76.	Pranata Komputer Mahir/Pelaksana Lanjutan	7	Rp. 3.915.950,00
77.	Pranata Komputer Terampil/Pelaksana	6	Rp. 3.510.400,00
78.	Pranata Komputer Pemula	5	Rp. 3.134.250,00
79.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia	8	Rp. 4.595.150,00
80.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir/Pelaksana Lanjutan	7	Rp. 3.915.950,00
81.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil/Pelaksana	6	Rp. 3.510.400,00
82.	Pustakawan Ahli Utama	13	Rp. 10.936.000,00
83.	Pustakawan Ahli Madya	11	Rp. 8.757.600,00
84.	Pustakawan Ahli Muda	9	Rp. 5.079.200,00

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PERKELAS JABATAN
85.	Pustakawan Ahli Pertama	8	Rp. 4.595.150,00
86.	Pustakawan Penyelia	8	Rp. 4.595.150,00
87.	Pustakawan Mahir/Pelaksana Lanjutan	7	Rp. 3.915.950,00
88.	Pustakawan Terampil/Pelaksana	6	Rp. 3.510.400,00
89.	Statistisi Ahli Utama	13	Rp. 10.936.000,00
90.	Statistisi Ahli Madya	11	Rp. 8.757.600,00
91.	Statistisi Ahli Muda	9	Rp. 5.079.200,00
92.	Statistisi Ahli Pertama	8	Rp. 4.595.150,00
93.	Widyaiswara Ahli Utama	14	Rp. 17.064.000,00
94.	Widyaiswara Ahli Madya	12	Rp. 9.896.000,00
95.	Widyaiswara Ahli Muda	10	Rp. 5.979.200,00
96.	Widyaiswara Ahli Pertama	8	Rp. 4.595.150,00

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 27/KEP/B4/2024  
TENTANG  
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

**KELAS JABATAN PELAKSANA  
DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>TUNJANGAN KINERJA PERKELAS JABATAN</b>
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	7	Rp. 3.915.950,00
2.	Pengadministrasi perkantoran	3	Rp. 2.898.000,00
		5	Rp. 3.134.250,00
3.	Pengolah data dan informasi	7	Rp. 3.915.950,00
4.	Penata Keprotokolan	7	Rp. 3.915.950,00
5.	Pengelola Keprotokolan	6	Rp. 3.510.400,00
6.	Penata Kelola Pemerintahan	7	Rp. 3.915.950,00
7.	Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan	7	Rp. 3.915.950,00
8.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	7	Rp. 3.915.950,00
9.	Dokumentalis Hukum	6	Rp. 3.510.400,00



NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PERKELAS JABATAN
10.	Pengelola Layanan Pengadaan	7	Rp. 3.915.950,00
11.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7	Rp. 3.915.950,00
12.	Pengawas Pendataan Statistik	7	Rp. 3.915.950,00
13.	Penata Layanan Operasional	7	Rp. 3.915.950,00
14.	Pengelola Layanan Operasional	6	Rp. 3.510.400,00
15.	Operator Layanan Operasional	3	Rp. 2.898.000,00
		5	Rp. 3.134.250,00
16.	Teknisi Sarana dan Prasarana	5	Rp. 3.134.250,00
17.	Petugas operasi dan pemeliharaan	5	Rp. 3.134.250,00
18.	Fasilitator Pemerintahan	7	Rp. 3.915.950,00

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,



PHASTO WARDOYO